

JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021

Volume 4, No 1, Januari-Juni 2019

Analisis Perumusan Strategi Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka
Diding Nurdin, Irza Adya Sugardha, dan Aceng Muhtaram Mirfani

Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin dan Keadilan Organisasi
Yuyun Elizabeth Patras, Rais Hidayat, dan Bukman Lian

Strategi Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada SMK Negeri 2 Bukittinggi
Eci Sriwahyuni dan Muhammad Kristiawan

Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Provinsi Jambi
Enadarlita dan Nova Asvio

Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam
Husaini dan Happy Fitria

Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran
Hamirul dan Dina Apriana

Implementasi Manajemen Pergruruan Tinggi (Studi Kasus Pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan)
Saipul Annur dan Suhono

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai
Yuni Fazira dan Riska Mirani

Manajemen Humas Untuk Meningkatkan Kredibilitas Sekolah
Agung Deddiliawan dan Yasir Arafat

Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kewirausahaan
Riswan Aradea dan Edi Harapan

Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang
Sabeli Aliya dan Tobari

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Destianty Noormala Sagita, Matin, dan Suryadi

Pengaruh Prakerin Terhadap Minat Berwirausaha Siswa di SMK Muhammadiyah 2 Palembang
Neta Dian Lestari dan Sari Hayati

JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

Terbit dua kali dalam setahun pada Januari dan Juli. Berisi tulisan Ilmiah Ilmu Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan yang merupakan ringkasan hasil penelitian.

Pelindung:
Meilia Rosani

Penasihat:
Bukman Lian

Penanggung Jawab:
Houtman

Pimpinan Redaksi:
Muhammad Kristiawan

Ketua Penyunting:
Ramadhanita Mustika Sari

Penyunting Ahli:
Salahuddin Khan (Gomal University, Pakistan)
Inaad Mutlib Sayeer (University of Human Development, Sulaimaniya, Iraq)
Imron Arifin (Universitas Negeri Malang)
Enco Mulyasa (Universitas Islam Nusantara)
Anakagung Gede Agung (Universitas Pendidikan Ganesha)

Penyunting Pelaksana:
Syarwani Ahmad
Edi Harapan
Tobari
Yasir Arafat

Tata Usaha:
Achmad Wahidy
Puspa Indah Utami
Subhan

Penerbit
Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782
e-mail: jurnalmpupgripalembang@gmail.com

Daftar Isi

Analisis Perumusan Strategi Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Majalengka Diding Nurdin, Irza Adya Sugardha, Aceng Muhtaram Mirfani	1 - 9
Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin Dan Keadilan Organisasi Yuyun Elizabeth Patras, Rais Hidayat dan Bukman Lian	10 - 20
Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada SMK Negeri 2 Bukittinggi Eci Sriwahyuni dan Muhammad Kristiawan	21 - 33
Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Provinsi Jambi Enadarlita dan Nova Asvio	33 - 42
Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam Husaini dan Happy Fitria	43 - 54
Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Memperbaiki Proses Pembelajaran Hamirul dan Dina Apriana	55 - 66
Implementasi Manajemen Pergruruan Tinggi (Studi Kasus Pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan) Saipul Annur dan Suhono	67 - 75
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Yuni Fazira dan Riska Mirani	76 - 83
Manajemen Humas Untuk Meningkatkan Kredibilitas Sekolah Agung Deddiliawan dan Yasir Arafat	84 - 89
Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Kewirausahaan Riswan Aradea dan Edi Harapan	90 - 96
Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang Sabeli Aliya dan Tobari	97 - 103
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta Destianty Noormala Sagita, Matin dan Suryadi	104 - 111
Pengaruh Prakerin Terhadap Minat Berwirausaha Siswa di SMK Muhammadiyah 2 Palembang Neta Dian Lestari dan Sari Hayati	112 - 120

ANALISIS PERUMUSAN STRATEGI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA

Diding Nurdin¹, Irza Adya Sugardha², Aceng Muhtaram Mirfani³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: *Irza_adya@yahoo.com*

Abstrak: Di negara berkembang, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Pemerintah membuat program wajib belajar 12 tahun. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program wajib belajar yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi program wajib belajar 12 tahun di Majalengka dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa strategi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Majalengka tentang pentingnya pendidikan terutama 12 tahun wajib belajar.

Kata Kunci: Wajib Belajar; Strategi; Analisis SWOT.

Abstract: In developing country, it takes quality human resources through education. The government needs to create a program that can make the distribution of education in Indonesia. This paper aimed at analyzing the existing compulsory education programs and factors that affect the realization of the 12 years compulsory education program in Majalengka by using SWOT analysis techniques. This paper used descriptive qualitative approach. The data were collected through interviews, documentation and observation. The result provided the strategy of the implementation 12 years compulsory education was raising awareness of the people of Majalengka about the importance of education especially the 12 years compulsory education.

Keywords: Compulsory Education Program; Strategy Formulation; SWOT Analysis.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengembangkan suatu negara. Tentunya Indonesia yang notabennya masih merupakan negara yang sedang berkembang dan ingin menjadi negara yang lebih baik lagi. Sangat kita sadari bahwa dalam membangun suatu negeri, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap bangsanya (Kristiawan dkk, 2017). Salah satu cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Menurut (Kristiawan, dkk 2018) pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi manusiawi dari para peserta didik, baik

berupa fisik, cipta maupun karsa agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi bagi perjalanan kehidupan. Pendidikan adalah sektor yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suatu bangsa (Kristiawan dan Rahmat, 2018). Pemerintah juga mengupayakan pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan yang dapat memberikan akses dan pemerataan perolehan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga anak usia produktif untuk sekolah tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah (Hasanah & Jabar, 2017).

Perlu diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang

tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Hidayat (2013) Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula.

Salah satu program pendidikan yang diciptakan pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan di seluruh daerah Indonesia adalah program wajib belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Hasanah & Jabar (2017) wajib belajar merupakan salah satu dari program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tiap masing-masing negara. Wajib belajar di masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahannya.

Program wajib belajar yang pertama dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pada tahun 1994, yang ditargetkan tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, karena adanya krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar akhirnya disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa negara telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, hal ini dikarenakan akan kesadaran yang sangat tinggi tentang

pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Tapi, sayangnya di Indonesia belum ada dasar hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang kuat, maka dari itu pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengikat, agar disemua daerah serentak mencanangkan wajib belajar 12 tahun, seperti program sebelumnya, yaitu wajar dikdas 9 tahun. Tentunya hal ini bisa dimengerti terkait belum adanya payung hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajar 12 tahun, karena masih banyak daerah yang belum mampu untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

Tentunya keberhasilan wajar dikdas 9 tahun memiliki kesinambungan dengan penyelenggaraan program wajar 12 tahun. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya program tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh sebab itu, Kemendikbud menetapkan program PMU sebagai kebijakan “rintisan” wajar 12 tahun yang sifatnya “anjuran” yang sangat diharapkan untuk dilaksanakan (*sunnah muakadah*) (Subijanto dkk, 2017).

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerbitkan Permendikbud no 19 tahun 2016 tentang program Indonesia pintar yang berisi tentang pemerintah yang mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Ternyata sebelum adanya kebijakan ini, sudah ditemukan daerah yang mencanangkan wajib belajar 12 tahun, yaitu di Provinsi Bali dan juga di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur

Dalam pencapaian wajib belajar 12 tahun, tentunya terdapat indikator dalam pencapaiannya, salah satunya adalah kita dapat melihat dari APK (Angka Partisipasi Kasar). Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa (tanpa mempedulikan umurnya) dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu (Berlian, 2011). Jadi, ketika daerah tersebut APK SD, SMP, dan SMA telah mencapai

100 %, maka daerahnya bisa dikatakan telah mencapai wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Kemudian, selain dapat dilihat dari APK nya, ketuntasan wajib belajar 12 tahun juga bisa dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam dimensi rata-rata lama sekolah, jadi apabila disuatu daerah telah mencapai rata-rata lama sekolah sekitar 12 tahun, maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan telah mencapai wajib belajar 12 Tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2017, kita dapat mengetahui bahwa untuk pencapaian APK SD/ sederajat rata-rata di Indonesia, telah mencapai 108,5 %, sedangkan untuk APK SMP/ sederajat telah mencapai 90,23 %, dan terakhir untuk APK SMA/ sederajat, telah mencapai 82,84%. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pencapaian APK SMA/ sederajat di Indonesia, merupakan pencapaian yang paling rendah dari semua jenjang. hal ini berarti terdapat anak yang putus sekolah pada jenjang sekolah menengah di Indonesia.

Sedangkan untuk pencapaian APK sekolah menengah dari 34 provinsi di Indonesia, diketahui bahwa Provinsi yang memiliki hasil pencapaian APK tertinggi di Indonesia yaitu, dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur yaitu sekitar 99,51%, sedangkan untuk pencapaian APK yang paling rendah, dimiliki oleh Provinsi Papua, yaitu sekitar, 67,94%.

Selain itu juga telah diperoleh data APK yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, dimana, hasil yang dicapai oleh Provinsi Jawa barat adalah hampir sama dengan pencapaian APK Nasional, dimana pencapaian APK SMA/ sederajat, merupakan pencapaian yang paling rendah pada semua jenjang. Untuk pencapaian APK SD/ sederajat telah mencapai 107,54%, kemudian untuk APK SMP/ sederajat telah mencapai 88,8%, dan untuk APK sekolah menengahnya, telah mencapai 76,48%. Selain itu juga diperoleh

datal bahwa dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, terdapat daerah yang sudah mencapai wajib belajar 12 tahun, yaitu kota Sukabumi, dimana APK semua jenjangnya sudah mencapai 100% termasuk APK SMA, dan untuk pencapaian APK sekolah menengah yang paling rendah adalah dimiliki oleh kabupaten Cianjur, yaitu sekitar 62,15%.

Yang menjadi daerah sorotan peneliti di sini adalah bukan untuk daerah dengan pencapaian APK terendah atau yang tertinggi. Melainkan daerah yang hasil pencapaian APK pendidikan dasar dan menengahnya berbeda, yaitu Kabupaten Majalengka. Data Pencapaian APK dan APM yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut.

Tabel 1. APK (Angka Partisipasi Kasar) SD, SMP, dan SMA Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017)

SD/MI		SLTP/MTS		SMA/MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
105,37	97,18	100,40	79,58	74,24	56,60

Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa pencapaian APK pendidikan dasar dan menengah telah memiliki perbedaan pencapaian hasil. Dimana untuk pencapaian APK pendidikan dasarnya sudah mencapai 100% dan berbanding terbalik dengan pencapaian APK sekolah menengahnya masih sekitar 74,24%, dibawah pencapaian APK rata-rata Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 76,48%. Maka dari itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pencapaian APK sekolah menengah di daerah tersebut sehingga pencapaian wajib belajar 12 tahun dapat terwujud.

Langkah yang wajib dilakukan adalah untuk segera merumuskan dan menetapkan strategi agar pelaksanaan dan pencapaian

wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka. Strategi merupakan serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti (*core competencies*) dan mendapatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) (Hitt, dkk, 2001). Strategi tersebut akan menentukan misi dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai (Wheelen & Hunger, 2003). Maka dari itu dalam hal ini Kabupaten Majalengka membutuhkan strategi yang cocok agar terjadi peningkatan APK sekolah menengah, mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah, sehingga wajib belajar 12 tahun ditempatkan ini tercapai.

Para pakar sepakat bahwa terdapat beberapa pendekatan atau instrumen yang dapat digunakan dalam menganalisis strategi. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Silalahi (2014) bahwa untuk merancang suatu strategi, terdapat sebuah alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa elemen kritis yang mempengaruhi keberhasilan, meliputi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Alat itu adalah matriks SWOT 4 K, (4 kuadran), yang terdiri dari 4 variasi alternatif: SO, WO, WT, dan ST. Matriks SWOT 4 K, adalah merupakan alat bagi manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja implementasi stratejik yang harus dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Di bawah ini merupakan contoh tabel analisis SWOT.

Tabel 2. Matrik Analisis SWOT
(Rangkuti, 2016)

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESSES
EFAS	(Tentukan 5-10 faktor kekuatan internal)	(Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal)

OPPORTUNITI ES (O)	Strategi SO	Strategi WO
(Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal)	Buat strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Buat strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
THREATS (T)	Strategi ST	Strategi WT
(Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal)	Buat strategi Yang menggunakan kekuatan Untuk mengatasiancaman	Buat strategi untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman

Selanjutnya berdasarkan yang tercantum dalam Rangkuti, (2004) melalui analisis SWOT akan diperoleh 4 buah strategi yaitu:

- Strategi SO (*Strength-Opportunities*), strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya
- Strategi ST (*Strenghts-Threats*) adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO (*Weknesses-Opportunities*), strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT (*Weknesses- Threats*), strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Menurut Nisak (2013) analisis SWOT itu membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dimasukan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*). Faktor eksternal dimasukkan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*). Setelah matrik

faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukkan dalam model kuantitatif, yaitu matrik SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan.

Tabel 3. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) (Rangkuti, 2004)

Faktor strategi Internal	Bobot Rating	Bobot Rating	Bobot X rating	Ket
Kekuatan	X	X	X	
Jumlah	X	X	X	
Kelemahan	X	X	X	
Jumlah	X	X	X	
Total	X	X	X	

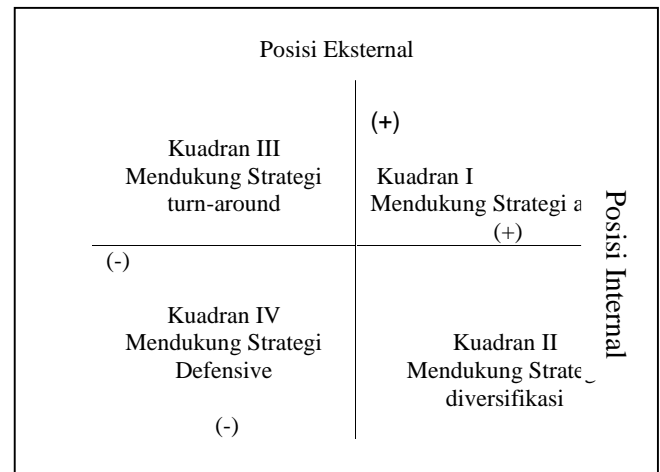
Tabel 4. Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) (Rangkuti, 2004)

Faktor strategi Eksternal	Bobot Rating	Bobot Rating	Bobot X rating	Ket
Peluang	X	X	X	
Jumlah	X	X	X	
Ancaman	X	X	X	
Jumlah	X	X	X	
Total	X	X	X	

Selanjutnya masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT ini adalah menentukan "what will be the principal purposes of the grand strategy?". Bisa dilihat, apakah perusahaan ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada? model yang lebih spesifik adalah dengan menggunakan *grand strategy selection matrix*. Idea dasar dari strategi ini adalah pemilihan dua variabel dalam proses penentuan tujuan utama *grand strategy* dan pemilihan faktor-faktor internal atau eksternal untuk pertumbuhan atau profitabilitas, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut, (Rangkuti, 2016).

Selanjutnya kita dapat mengetahui posisi organisasi dan dapat menemukan *grand strategy*, sehingga kita dapat mengetahui arah perkembangan selanjutnya, strategi

mana yang harus diutamakan. Matriks grand strategy dapat dilihat seperti di bawah ini.



Gambar 1. Matriks Grand Strategy (Rangkuti, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang cocok dengan kondisi yang dimiliki oleh Kabupaten Majalengka dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun, dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan., terkait program, strategi yang ada. Serta analisis yang dilakukan terhadap faktor Internal dan eksternal Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian wajib belajar 12 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Majalengka. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi aktif. Maka penelitian penelitian ini dimulai dengan cara mendapatkan informasi terkait pelaksanaan wajib belajar di Kabupaten Majalengka melalui beberapa proses dengan langsung terjun kelapangan. Dalam metode ini diharapkan diperoleh data dan informasi yang sebenarnya terkait upaya pelaksanaan kearah wajib belajar 12 tahun di Kabupaten

Majalengka, dari program-program, strategi, kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan yang dimiliki daerah mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya, antara lain:

1. Menyusun database pendidikan dan Rencana Strategis Pendidikan 2018-2022 baik di Dinas Pendidikan dan di Kemenag Majalengka.
2. Menambahkan jumlah ruang kelas di SMK.
3. Menambahkan jumlah ruang kelas di madrasah.
4. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan globalisasi dengan memanfaatkan teknologi.
5. Semua madrasah harus memenuhi standar nasional pendidikan.
6. Memberikan beasiswa untuk siswa yang hafal al-Qur'an.
7. Menetapkan standar minimal lulusan SMA sederajat, untuk bekerja di bandara.

Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi tantangan, antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan wajib belajar 12 tahun oleh tim akselerasi wajib belajar 12 tahun.
2. Membuat Peraturan daerah penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Majalengka.
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, yaitu:

1. Melengkapi dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM.
2. Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif guru di daerah terpencil dan memberikan reward untuk guru yang berprestasi.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari tantangan.

1. Menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan skala prioritas.
2. Mengembangkan pola atau model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, dan dapat mencegah anak yang putus sekolah di Kabupaten Majalengka. Di Majalengka sendiri hasil APK SMA merupakan yang paling rendah bila dibandingkan dengan APK SD dan SMP, ini artinya di Majalengka masih banyak anak putus atau yang tidak bersekolah di usia SMA dari usia 16-18 tahun. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti, alasan anak yang putus atau tidak bersekolah di Majalengka adalah karena faktor ekonomi, karena keinginan untuk bekerja dan juga faktor yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan, sehingga tidak

milikinya motivasi diri untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi.

Kekutan, kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Majalengka dalam upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam tabel IFAS dan EFAS. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Matriks IFAS dan EFAS diketahui bahwa 1) pada tabel IFAS diperoleh penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata merupakan kekuatannya lebih kecil dari pada penjumlahan skoring faktor-faktor kunci kelemahan yaitu $1,25 < 1,35$. Hal ini berarti apabila Kabupaten Majalengka akan menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun, maka pemerintah setempat hendaknya lebih memfokuskan strateginya pada kegiatan-kegiatan yang meminimalkan kendala-kendala internal dan tidak pada hal-hal yang bersifat ekspansif; 2) sedangkan pada tabel EFAS diperoleh penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata merupakan peluangnya lebih besar dari pada penjumlahan skoring faktor-faktor kunci tantangan yaitu $1,85 > 0,65$. Hal ini berarti peluang untuk menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi.

Lalu, untuk posisi Kabupaten Majalengka bila digambarkan dengan Matriks *Grand Strategy* berada pada Kuadran III, dengan karakteristik: Organisasi mempunyai peluang yang besar tetapi juga mempunyai beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, kecuali dapat meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi. Fokus strategi organisasi pada posisi ini ialah mengatasi kelemahan-kelemahan atau meminimalkan kendala-kendala internal.

Dengan posisi organisasi pada kuadran III, maka Kabupaten Majalengka perlu melakukan (1) Melengkapi dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan pendidikan sesuai

dengan SPM, (2) Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru didaerah terpencil dan memberikar reward untuk guru yang berprestasi (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkanya, dengan melakukan gerakan terpadu program wajib belajar 12 tahun dengan melibatkan semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usaha, sehingga pelaksanaan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa Majalengka mempunyai peluang yang besar dalam upaya melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Pendapat ini diungkapkan setelah peneliti mengetahui dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki Majalengka dalam upaya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Peneliti juga melakukan perumusan strategi dari apa yang dianalisis sebelumnya, hal ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah semua jenjang di Majalengka dan juga dapat mengatasi faktor-faktor penyebab anak yang putus sekolah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Kabupaten Majalengka masih belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, dikarenakan, belum mempunyai payung hukum yang kuat, yang dapat mengatur dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka. Berbeda dengan Program wajib belajar 9 tahun, yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Tetapi meskipun belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, Kabupaten Majalengka sudah melaksanakan pendidikan menengah universal, yang merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun.

Peneliti menghasilkan empat jenis strategi, setelah melakukan analisis strategi dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Jenis strategi yang pertama adalah (1) Strategi SO (*Strength-Opportunities*), strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya (2) Strategi ST (*Strenghts-Threats*) adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman (3) Strategi WO (*Weknesses-Opportunities*), strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada (4) Strategi WT (*Weknesses-Threats*), strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Matriks IFAS dan EFAS diketahui bahwa pada tabel IFAS diperoleh penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata merupakan kekuatannya lebih kecil dari pada penjumlahan skoring faktor-faktor kunci kelemahan. Hal ini berarti apabila Kabupaten Majalengka akan menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun, maka pemerintah setempat hendaknya lebih memfokuskan strateginya pada kegiatan-kegiatan yang meminimalkan kendala-kendala internal dan tidak pada hal-hal yang bersifat ekspansif. Sedangkan pada tabel EFAS diketahui bahwa penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata merupakan peluangnya lebih besar dari pada penjumlahan skoring faktor-faktor kunci tantangan. Hal ini berarti peluang untuk menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi.

Sedangkan untuk Posisi Kabupaten Majalengka bila digambarkan dengan

Matriks *Grand Strategy*, berada pada Kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mempunyai peluang yang besar tetapi juga mempunyai beberapa kelemahan yang harus diperhatikan dan fokus strategi organisasi pada posisi ini ialah mengatasi kelemahan-kelemahan atau meminimalkan kendala-kendala internal.

Dengan posisi organisasi pada kuadran III, maka Kabupaten Majalengka perlu melakukan (1) Melengkapi dan memperbaiki fasilitas dan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM, (2) Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan insentif guru di daerah terpencil dan memberikan reward untuk guru yang berprestasi (3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan, dengan melakukan gerakan terpadu program wajib belajar 12 tahun dengan melibatkan semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usaha, sehingga pelaksanaan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, N. V. A. (2011). Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17 (1), hlm. 43-55.
- Hasanah, M.Y. & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5 (2), hlm, 228-239.
- Hidayat, R. (2013). Pengaruh manajemen strategik dan biaya pendidikan terhadap daya saing sekolah di sekolah dasar negeri se- Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 1 (2), hlm. 187-192.
- Hitt, M.A. (2001). *Manajemen Strategi: Daya Saing dan Globalisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hunger, D. K.& Thomas L.W. (2003). *Manajemen strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(2), 373-390.
- Kristiawan, M., Suryanti, I., SD, S. P., Muntazir, M., Ribuwati, Areli, A. J., Agustina, M. et. al. (2018). *Inovasi Pendidikan*. Jawa Timur: Wade Group National Publishing.
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), hlm. 468-476.
- Permendikbud No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. (2017). *APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM Tahun 2016/2017 (termasuk Madrasah dan sederajat)*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud.
- Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Silalahi, W. R. (2014). Peranan Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran Mahasiswa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 10 (2), hlm.197-2017.
- Subijanto. (2017). Program pendidikan menengah universal sebagai persiapan wajib belajar dua belas tahun. *Cakrawala Pendidikan*, 34 (1), hlm 1-12.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.